



## **KOMUNIKASI MULTIKULTURAL: PERSPEKTIF INDONESIA**

**Nurul Hidayat**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
*Nurulhidayat271191@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*The idea of a multicultural society first appeared in the West and has become official public policy, it also represents the efforts of liberal democrats to promote ethnic / racial equality. The basic premise of multiculturalism is how to show tolerance for the diversity of cultural practices in the context of the nation state. In its application, especially from a media point of view, global (capitalist) ownership implicitly utilizes the media to market liberal culture and education globally, as well as to make society a strategic object to reap various benefits. This becomes very interesting to discuss as an extraordinary scientific discourse, deepening the study of multiculturalism and its role in changing the life of Indonesian people, especially the Indonesian Islamic community in their relationship when adapting to various cultures, ethnicities, beliefs, and even values developed by global rulers, ownership capitalist.*

**Keywords:** *Communication, Multicultural, Indonesia*

### **ABSTRAK**

Ide tentang masyarakat multikultural awal kali muncul di Barat dan sudah menjadi kebijakan publik resmi, hal ini juga mewakili upaya kaum liberal demokrat untuk mempromosikan kesamaan etnis/rasial. Yang menjadi premis dasar dari multikulturalisme adalah tentang bagaimana menunjukkan toleransi terhadap keanekaragaman praktik-praktik budaya dalam konteks negara bangsa. Dalam aplikasinya, terutama dari sudut pandang media, kepemilikan global (kapitalis) secara tersirat memanfaatkan media tersebut guna memasarkan budaya dan pendidikan liberal secara global, serta menjadikan masyarakat sebagai obyek strategis untuk meraup berbagai keuntungan. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dibahas sebagai wacana keilmuan yang luar biasa, memperdalam kajian multikulturalisme dan peranannya untuk mengubah kehidupan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam Indonesia dalam hubungannya saat beradaptasi menghadapi berbagai budaya, etnis, kepercayaan, bahkan nilai yang dikembangkan oleh penguasa global, kepemilikan kapitalis.

**Kata Kunci:** *Komunikasi, Multikultural, Indonesia*

## PENDAHULUAN

Kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain sehingga "masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". Pada pihak lain, realitas "multikultural" (Depdiknas 2001, 611) tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" atau "budaya bangsa" yang dapat menjadi "*integrating force*" yang dapat mengikat seluruh keragaman etnis, suku bangsa dan budaya tersebut" Bentuk masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk baik dari segi suku, etnis, dan agamanya, hal ini ditandai dengan adanya lebih dari 350 bahasa daerah berkembang di Indonesia dan ratusan etnis tersebar di berbagai wilayah, serta 5 agama yang dianut di Indonesia.

Indonesia sebagai bangsa plural dan majemuk menegaskan bahwa bangsa memiliki keragaman budaya, maka bangsa ini tergolong bangsa multikultural. Bangsa multikultural yang ideal adalah kebangsaan yang terbangun dari berbagai suku dan budaya yang dapat hidup dalam satu atap kebangsaan secara damai dan tentram, sehingga terdapat penghargaan terhadap dan oleh budaya yang beragam. Namun, kenyataan tidak selalu sama dengan yang diharapkan, masih terjadi konflik di beberapa bagian bangsa Indonesia, sebut saja di beberapa daerah konflik berkelanjutan seperti, Maluku, Sulawesi Tengah, Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah yang secara geografis menyebar di beberapa bagian tanah air Indonesia. Sehingga di sini pemakalah akan menguraikan bagaimana komunikasi multi-kultur ini bisa dijadikan suatu jembatan untuk membangun kebersamaan yang multi-etnik, multirasial, dan multikultur.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Definisi metode penelitian kualitatif yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Dengan kata lain metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya. Sebuah penelitian, di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi (Pengamatan), Interview (wawancara), Dokumentasi.

Analisis merupakan proses menemukan sebuah kesimpulan penting dari data yang telah terkumpul proses analisis adalah proses yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terdiri secara bersamaan yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan *conclulusin drawing/verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi). Dalam usaha menarik kesimpulan akhir dari data lapangan setelah data-data diperoleh secara lengkap, maka selanjutnya adalah mengkoordinasikan dan menganalisis data-data tersebut dengan analisis induktif dan deduktif agar data-data lebih spesifik

## PEMBAHASAN

### Indonesia Multikultural

Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*", yang mengandung makna meskipun Indonesia berbhinneka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar.

Namun, kemajemukan terkadang membawa berbagai persoalan dan potensi konflik yang berujung pada perpecahan. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya, tidak mudah mempersatukan suatu keragaman tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat multikultural. Terlebih, kondisi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling majemuk di dunia, selain Amerika. (Syafiq A. Mughni 2008).

Masyarakat plural Indonesia selalu dihadapkan pada persoalan politis dan social yaitu bagaimana mencapai tingkat integritas yang bersifat nasional. Baik bersifat horizontal, yaitu hubungan antar warga yang beda latar belakang budayanya maupun secara vertical menghadapi berbagai macam bentuk hubungan dengan pemimpinnya tidak mungkin dilepaskan dari statifikasi sosialnya.

Pierre L van de Berghe mengemukakan bahwa masyarakat multikultur mempunyai beberapa karakteristik yang khas, sebagai berikut : a) Masyarakat dalam sigmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok latar budatya, sub-budayayang berbeda. b) Memiliki struktur social yang terbagi-bagi dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. c) Kurang adanya kemauan untuk mengembangkan konsesus antar anggota masyarakatnya tentang nilai-nilai social yang fundamental. d) Kurangnya kesdaran mengembangkan consensus relative sering menumbuhkan konflik antar kelompok sub-budatya tersebut. e) Konflik bisa dihindari dan integrasi social dapat terjadi tetapi dengan jalan relative menggunakan paksaan ditambah adanya ketergantungan satu sama lain dengan bidang ekonomi. f) Adanya dominasi politik kelompok satu atas kelompok yang lain. (Andrik Purwasito 2015, 426).

Nasikun mengambil konsep van de berghe dan para ahli fungsionalisme struktur menyimpulkan bahwa dua landasan terjadinya integrasi masyarakat, meskipun menjadi sngat terbatas dalam masyarakat multikultur. a) Masyarakat senantiasa berintegrasi di atas tumbuhnya consensus oleh sebagian besar masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. b) Adanya berbagai macam anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai macam kesatuan sosial. Dengan adanya kesatuan sosial tersebut jika terjadi konflik dengan kesatuan sosial yang lain akan segera dinetralisir oleh adanya loyalitas ganda.

Menurut Nasikun, konflik-konflik yang sering terjadi dalam masyarakat multicultural cenderung bersifat ideologis dan politis. Berbeda dengan Karl Mark yang mengatakan faktor konflik tersebut adalah ekonomi yang diperoleh melalui produksi kerja. Tingkat idelogis pula, konflik yang terjadi karena sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok dan merupakan

ideologi tersebut berasal dari kesatuan sosial. Sedangkan tingkat politis pula disebabkan pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi. Faktor Ekonomis pula tepat pada alasannya memperebutkan lahan produksi yang menompang kehidupan yang berpengaruh pada struktur sosial. Konflik Sosial yang menjadi dasar sekali adalah perubahan sosial itu sendiri. (Conrad P. Kottak 1989, 200-206).

Ketika terjadi konflik, pihak-pihak yang berselisih akan mengikat dirinya secara cepat dengan dua cara yakni: 1) Memperkukuh solidaritas yang berbentuk organisasi kemasyarakatan, pertahanan bersama. 2) Memperkukuh identitas cultural terhadap dirinya dengan kelompok pesaing misal di bidang pendidikan, organisasi sosial, ekonomi, politik dan warga masyarakat lainnya.

Para penganut aliran politik lebih percaya pada pendekatan paksaan dari suatu kelompok dominan atau kesatuan sosial yang dominan atas kelompok dan kesatuan yang lain. (Zakiyuddin Baidhawi 2005, 7-9). Ekonom menjadi faktor utama dimana setiap orang bergantung dengan orang lain sehingga mereka saling membutuhkan untuk menciptakan hidup rukun dan aman. Paksaan tidak akan selama menciptakan aman sebaliknya membawa masyarakat kearah disintegrasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemerintah Orde baru.

Integritas masyarakat Indonesia dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan agar masyarakat mampu membangun suatu kultur baru yang mungkin berbeda dengan kelompoknya. Hal tersebut dijadikan pedoman dan kaidah-kaidah dalam interaksi sosial bersama. Kultur baru yang di maksud adalah nilai-nilai atau norma-norma umum yang disepakati menjadi kaidah masyarakat bukan sekedar retorika, namun harus benar-benar dihayati dan dijadiak sebagai milik sendiri. (Azyumardi Azra 1999,12-13).

### **Cara Penyelesaian Konflik Multikultural**

Secara konseptual, konflik aras politik pada area lokal Indonesia disebabkan oleh berbagai konflik kepentingan, baik idelogis, politik maupun sosial ekonomi. Beberapa konflik multicultural pecah yang terjadi diberapa daerah diantaranya di Sambas, Sanggau Ledo di Kalimantan Barat, Poso di Maluku dan lain-lainnya termasuk pengusiran orang-orang bukan lokal yang lahir dibeberapa tempat khususnya didaerah gerak yang ingin memisahkan dengan RI pemakaran seperti di Papua dan GAM.

Konflik horizontal tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh etnisitas (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) dan agama (Poso, di Ambon) serta rasial di Solo. Sedangkan konflik Vertikal pula disebabkan oleh ideology, politik, ekonomi seperti di Aceh dan Papua. Konflik-konflik yang biasanya dilatarbelakangi etnis, agama, ras tersebut biasanya dikenal dengan istilah SARA (Suku, Agama dan Ras) dan sedangkan konflik yang dilatarbelakangi ideology, politik, ekonomi, yaitu kepentingan pusat dan dan darerah khasanah politik di Indonesia dikenal dengan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) atau gerakan separatisme, gerakan makar dan lain sebagainya.

Di Indonesia, konflik-konflik yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari unsur sejarah baik horizontal maupun vertikal. Di Kalimantan Barat misalnya dikaitkan dengan orang-orang Madura yang datang diperkirakan sekitar tahun 1920an. Mereka bisa hidup rukun dengan

penduduk asli Kalimantan yakni Melayu dan Dayak yang telah lama tinggal selama berabad-abad.

Konflik horizontal dalam lingkup kecil seperti perkelahian antarwarga sesuatu hal yang mudah terjadi, bahkan masyarakat yang homogeny sekalipun. Namun konflik-konflik kecil yang melibatkan prasangka etnis akan sangat mudah memunculkan konflik yang besar. Hal tersebut disebabkan basis nilai-nilai negat dalam suatu kelompok atas kelompok lain seperti penilaian standart budaya sendiri (etnosentrisme) dan pandangan umum (streatip).

Sebagai contoh di Toho Kabupaten Pontianak pada tahun 1968 terjadi kerusuhan yang disebabkan terbunuhnya pegawai kecamatan dari etnis dayak di bunuh oleh suku Madura . Kerusuhan juga terjadi pada tahun 1978 di Bodok Sanggau, tahun 1979 di Semalantan, tahun 1983 di Sambas di Sungai Enau, Pontianak dan tahun 1996 terjadi konflik besar disebabkan percekocokan kecil pada pesta dangdut dan berjoget, seorang wanita Ledo beretnis Madura tersenggol dengan dua pemuda lokal. Pemuda lokal tersebut dikeroyok sehingga parah dan dilarikan kerumah sakit. Esoknya orang-orang Ledo tidak dapat menerima perlakuan tersebut menyebabkan kerusuhan massa. Akhirnya warga etnis Madura terdesak dan diungsikan ke Pangkalan Supadio II berjumlah 800 orag dan 200 orang lainnya di ungsikan di Asrama Kompi C Bataylion Beruang Hitam, Singkawang. Kerusuhan tersebut telah menelan korban tidak hanya laki-laki tetapi wanita, anak-anak serta orang tua yang tidak terhitung jumlahnya.

Kalimantan Barat adalah wilayah yang multietnis, multirasial dan multiagama yang terdiri dari dayak, melayu, tiongkok, bugis, dan Madura. Etnis Madura biasa mengerjakan lading dan berdagang, sedangkan melayu dan Dayak telah lama hidup berdampingan selama berabad-abad secara damai termasuk kegiatan tradisional yakni budidaya cocok tanam. (Andrik Purwasito, 434-439).

Secara sosiologis, perkembangan masyarakat heterogen seperti Kalimantan Barat, mulai bergerak kearah kompetisi yang semakin kuat. Kompetisi multicultural mempunyai kecendrungan yang mudah dipicu oleh disharmoni sosial di satu pihak. Dipihak lain justru ada kompetisi merupakan kekuatan untuk menjalin integrasi yang lebih solid. Hal ini sangat bergantung dengan konflik-konflik laten, seperti pengembangan etnosentrisme dan streatip oleh kelompok garis keras ehingga menyebabkan disintegrasi. Dalam situasi perubaha sosial yang secara cepat, dimana komunitas budaya yang berbeda kurang terbuka dan tidak mau belajar serta memahami budaya komunitas lain, akan lebih menyulitkan antisipasi terhadap beberapa kehendak masyarakat karena kehendak tersebut bersumber dari mentalitas mereka.

## **Sara**

Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, sukubangsa (etnis) dan keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya. Pada satu sisi, kemajemukan budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai, namun pada sisi yang lain keragaman kultural memiliki potensi bagi terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa. Pluralitas budaya ini

seringkali dijadikan alat untuk memicu munculnya konflik suku bangsa, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pertikaian SARA yang terjadi di hampir sepanjang jalur negeri ini sebenarnya ingin menegaskan kembali bahwa sifat kemajemukan yang dimiliki masyarakat Indonesia merupakan persoalan yang perlu dikelola dengan serius. Dalam arti, perlu ada penanganan yang sifatnya mendasar, karena pertikaian terbuka (*manifest*) maupun konflik yang tersembunyi (*latent*) terjadi silih berganti. Penanganan terhadap konflik SARA yang dilakukan pemerintah selama ini masih sebatas mengurangi ketegangan dengan bertindak sebagai fasilitator atau penengah, misalnya mencari solusi damai dengan mengundang dan mempertemukan pemimpin-pemimpin kelompok yang bertikai. Cara penyelesaian seperti ini tidak akan pernah menyentuh akar persoalan dari kelompok-kelompok yang bertikai, karena alternatif penyelesaian yang ditawarkan cenderung bersifat formalitas, tanpa melewati sebuah proses dialog yang matang.

Oleh sebab itu cara penyelesaian konflik horizontal di tempat tertentu belum cocok ditempat lain. Berdasarkan beberapa pengalaman setempat telah ditelaah sifat yang lebih teoritis ketimbang praktis diantaranya: *Latar Belakang*, Konflik SARA adalah konflik yang tertua, karena sejak manusia hidup dalam komunitas yang berbeda-beda tumbuh dengan sendirinya yang mendasar. Secara *nature* (alamiah) manusia dengan kelompoknya telah dibekali dengan pembatasan yang disebut norma dan nilai-nilai yang berkembang dan di anut oleh masyarakat tersebut. Secara dinamik (perkembangan) manusia, baik lingkungan social, budaya, ekonomi dan politik. Dalam konteks tersebut maka perbedaan budaya (ras, social ekonomi, agama, adat kebiasaan, bahasa). Potensial melahirkan *mis understanding*, kemejemukan di Indonesia itulah hal yang terbaik untuk dikembangkan sebagai dasar mengatasi konflik unsur SARA.

*Pendekatan Budaya*, Secara teoritis hubungan yang bersifat pasif maupun aktif dalam kehidupan sehari-hari tergantung ideology yang di anut dan juga erat hubungan dengan budaya dimana mereka hidup. Dalam pendekatan budaya difokuskan pada kajian komunikasi yang pertama membangun komunikasi social-budaya yang terbuka dan egaliter, kedua membangun seluas-luasnya ruang public antara entik dan ketiga membuka saluran sosialisasi diberbagai tingkatan sebagai cara menangkap aspirasi dan realitas social masyarakatnya. *Pendekatan politik*, Otonomi daerah punya misi untuk menyelamatkan Negara. Dengan harapan OTDA sebagai suatu kebijakan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan pemerintah yang baik. (*good governance*) di daerah. *Pers dan Strategi Komunikasi Multikultur*. Komunikasi dan pers dalam pandangan ini menjadi jembatan emas Indonesia dimasa depan. Pers dan komunikasi mampu mengungkapkan secara khas seluruh perbendaharaan perilaku dan realitas masyarakat secara apa adanya dalam interaksi antar komunitas. Karena perilaku komunikasi masyarakat sangat bergantung dari budaya mana ia dibesarkan. *Pencerahan Moral*. Dalam strategi komunikasi multicultural tujuan akhir adalah diarahkan kepada setiap warga masyarakat supaya memperoleh pencerahan moral, dari adanya proses komunikasi social-budaya yang *shared culture* dan terpaan media yang berisi *civild education*.

**PENUTUP**

Indonesia sebagai bangsa plural dan majemuk menegaskan bahwa bangsa memiliki keragaman budaya, maka bangsa ini tergolong bangsa multikultural. Bangsa multikultural yang ideal adalah kebangsaan yang terbangun dari berbagai suku dan budaya yang dapat hidup dalam satu atap kebangsaan secara damai dan tentram,

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azra, Azyumardi 1999. *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta, dan Tantangan* Cet. I; Bandung Remaja Rosdakarya.
- Baidhawi, Zakiyuddin. 2005, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* t.tp: Erlangga.
- Depdiknas, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* Jakarta: Balai Pustaka.
- Kottak, Conrad P. 1989, *Anthropology: the Exploration of Human Diversty* New York: Random House.
- Mahfud, Choirul 2008. *Pendidikan Multikultural* Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwasito, Andrik. 2015. *Komunikasi Multikultur*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sudibyoy, Agus. Ibn Hamad, Muh. Qodari, 2001, *Kabar-kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa*(Cet. I; Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).